

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia. Proses pembangunan Indonesia masih memiliki berbagai masalah yang dihadapi. Salah satu masalah kompleks yang dihadapi oleh Indonesia adalah ketimpangan pendapatan antar wilayah. Ketimpangan dapat terjadi karena salah satu faktor seperti Pemerintah lebih aktif didalam membangun wilayah perkotaan dan di daerah hanya beberapa yang tersentuh di dalam pembangunan. Adanya perbedaan pembangunan dan infrastruktur juga berdampak terhadap pendapatan masyarakat baik yang ada di kota maupun di daerah (Kuncoro, 2004).

Otonomi daerah yang diterapkan di negara ini memberikan kesempatan setiap daerah untuk mengatur dan mengelola perekonomian daerahnya menurut prakarsa sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan masalah-masalah pokok dalam pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (Kuncoro, 2004).

Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada pemerintah kabupaten atau kota, sehingga pemerintah kabupaten atau kota diharapkan mampu mandiri di dalam menyelenggarakan pemerintahan, menentukan kebijakan pembangunan serta pendanaan. Kondisi ini akan mampu meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber potensi yang dimiliki daerah, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat diusahakan seminimal mungkin (Erawati dan Yasa, 2012).

Gambaran secara menyeluruh untuk melihat kinerja dan seberapa efektif kondisi perekonomian suatu daerah dilakukan dengan mengukur tingkat

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dari waktu ke waktu. Memang disadari bahwa tingginya angka PDB belum tentu akan mencerminkan meratanya distribusi pendapatan. Kenyataannya bahwa pendapatan masyarakat di suatu daerah tidak selalu merata (Pangkiro, dkk., 2016).

Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian pembangunan, maka semakin besar pula disparitas yang akan terjadi. Selanjutnya produk domestik bruto, digunakan sebagai salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan keberhasilan suatu perekonomian.

Kota Salatiga sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 56,781 km<sup>2</sup>. Kota Salatiga pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk yang tidak banyak yaitu sebesar 183.828 jiwa. Penduduk Kota Salatiga belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Kota Salatiga. Umumnya, penduduk banyak menumpuk di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan), sebesar 95,76. Kepadatan penduduk di Kota Salatiga mencapai kepadatan penduduk Salatiga sebesar 3.237 jiwa setiap km persegi (BPS Kota Salatiga, 2016).

Kota Salatiga terbagi menjadi empat kecamatan dimana tentunya setiap kecamatan masing-masing mempunyai potensi ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan wilayahnya masing-masing sehingga akan mempunyai PDRB, tingkat pertumbuhan dan prioritas sektoral yang berbeda-beda pula. Berdasarkan data dari BAPPEDA Kota Salatiga tahun 2017 menyatakan bahwa sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota Salatiga adalah Kecamatan Sidorejo, yakni sebesar Rp. 570.081.810.000 pada tahun 2014 dan pada Tahun 2016 naik menjadi sebesar Rp. 697.593.540.000. Secara detail mengenai peranan PDRB masing-masing kecamatan pada Tahun 2014 dan 2016 di Kota Salatiga dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.1. Nilai dan Peranan PDRB Kecamatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2016 dalam Jutaan

No	Nama Kecamatan	Nilai PDRB 2014 (Rp)	Nilai PDRB 2016 (Rp)	Selisih PDRB (Rp)
1	Argomulyo	301.413,37	368.741,00	67.327,63
2	Tingkir	443.003,60	541.630,14	98.626,54
3	Sidomukti	346.288,12	424.301,65	78.013,53
4	Sidorejo	570.081,81	697.593,54	127.511,73
<b>Jumlah</b>		<b>1.660.786,90</b>	<b>2.032.266,33</b>	<b>371.479,43</b>

Sumber: BAPPEDA Kota Salatiga, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa PDRB tiap-tiap kecamatan di Kota Salatiga mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terdapat di Kecamatan Sidorejo. Kecamatan Sidorejo memiliki PDRB tertinggi dikarenakan kecamatan tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi di Kota Salatiga. Nilai dan peranan PDRB kecamatan tersebut belum diketahui sektor ekonomi yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan komparatif, sehingga nilai PDRB yang ada hanya terbatas pada angka-angka kuantitatif saja. Untuk itu perlunya mengetahui sektor basis dan sektor non basis, dilanjutkan dengan identifikasi tipologi pada masing-masing kecamatan. Permasalahan lain yang perlu dikaji adalah pertumbuhan ekonomi masing-masing kecamatan per sektor ekonomi yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan spesialisasi. Hal ini menjadi penting, dikarenakan potensi yang belum diketahui keunggulannya sulit dikembangkan, namun jika sudah diketahui sektor mana saja yang memiliki potensi masing-masing, maka pemerintah bisa mengambil sikap dan kebijakan terhadap sektor-sektor tersebut dengan lebih tepat.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui besar potensi serta identifikasi sektor-sektor ekonomi subwilayah atau kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Salatiga sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian “*Analisis Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kota Salatiga Tahun 2014-2016*”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan dikaji adalah:

1. bagaimanakan potensi ekonomi pada masing-masing kecamatan di Kota Salatiga tahun 2014-2016?
2. bagaimanakah tipologi pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga tahun 2014-2016?

## **1.3. Tujuan**

1. Mengetahui potensi ekonomi pada masing-masing kecamatan di Kota Salatiga tahun 2014-2016.
2. Mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga tahun 2014-2016.

## **1.4. Manfaat**

1. Bagi Pemerintah

Memudahkan pemerintah Kota Salatiga membuat perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan potensi ekonomi dan tipologi yang dimiliki tiap Kecamatan di Kota Salatiga.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi mengenai potensi wilayah yang ada di Kota Salatiga dan dapat Menambah wawasan dalam hal membangun ekonomi wilayah.

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai tambahan referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

## **1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya**

### **1.5.1. Telaah pustaka**

#### 1.5.1.1. Konsep wilayah

Untuk dapat mewujudkan analisis teori yang baik dan harmonis, konsep wilayah (*region*) direpresentasi dari unsur ruang (*space*). Dalam hal ini, wilayah diartikan sebagai suatu kesatuan ruang yang dikelompokkan berdasarkan unsur tertentu tergantung dari tujuan analisis (Sjafrizal, 2012). Unsur tertentu tersebut dapat menyangkut dengan kondisi sosial ekonomi maupun ketertarikan

antarwilayah. Bahkan, pengelompokan wilayah dapat pula dilakukan tidak berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi juga pertimbangan kemampuan administrasi pemerintah. Dapat pula terjadi, pengelompokan wilayah dilakukan untuk tujuan perencanaan dengan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut secara sekaligus.

Berdasarkan beberapa unsur utama yang perlu dipertimbangkan dalam pengelompokan wilayah tersebut, maka secara umum terdapat empat bentuk wilayah yang banyak digunakan dalam Analisis Wilayah dan Perkotaan, yaitu (Sjafrizal, 2012):

1. *Homogenes Region*, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk dengan memerhatikan kesamaan karakteristik sosial-ekonomi dalam wilayah yang bersangkutan. Termasuk ke dalam wilayah seperti ini antara lain adalah: provinsi, kota, kabupaten, dan desa. Sedangkan pada tingkat internasional, termasuk dalam wilayah ini adalah kesatuan beberapa negara ASEAN (Association Of Southeast Asian Nation), European Union dan lain-lainnya.
2. *Nodal region*, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan keterkaitan sosial-ekonomi yang erat antar daerah. Keterkaitan ini menjadi penting karena dapat mendorong terbentuknya kesatuan yang erat antara beberapa daerah atau negara terkait. Termasuk ke dalam wilayah ini antara lain adalah: JABODETABEK (kesatuan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), SIJORI (Singapore-Johor-Riau) dan segitiga pertumbuhan (Growth Triangle) baik IMS-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle).
3. *Planning region*, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk untuk tujuan penyusunan perencanaan pembangunan wilayah. Termasuk ke dalam wilayah ini antara lain adalah: Wilayah Pembangunan (Development Region) dalam formulasi perencanaan pembangunan baik pada tingkat nasional maupun provinsi atau kabupaten dan kota sebagaimana umumnya terlihat pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) atau Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

4. *Administrative Region*, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kebutuhan administrasi pemerintahan. Termasuk kedalam wilayah ini adalah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Tidak dapat disangkal bahwa adkalanya pengelompokan wilayah administrasi ini sama dengan wilayah homogeneous, khususnya dalam penentuan wilayah provinsi atau kota.

#### 1.5.1.2. Perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab (Kuncoro, 2004). Melalui perencanaan pembangunan daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

Ada tiga unsur dasar dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah, yaitu (Kuncoro, 2004):

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang *realistik* memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, ktertarikan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang bik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah misalnya; administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas; biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogianya dilakukan dan apa yang dapat dialakukan, denagan menggunakan berbagai sumber daya pembangunan

sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap dan tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan objek perencanaan.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik, diperlukan beberapa teknik analisis khusus bidang perencanaan regional. Alasannya adalah bahwa teknik perencanaan yang biasanya dipakai dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional banyak yang tidak sesuai dengan kondisi dan struktur pembangunan daerah di mana aspek ruang (*space*) dan perbedaan potensi pembangunan antar wilayah merupakan unsur sangat penting (Sjafrizal, 2012). Pengertian regional disini adalah wilayah administratif dalam suatu negara (*subnation*) yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota. Teknik analisis regional menjadi penting karena jumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dewasa ini mencapai lebih dari 500.

#### 1.5.1.3. Koefisien lokasi

Dalam melakukan analisis terhadap kondisi umum daerah dan perumusan strategi pembangunan yang tepat dan terarah, pertanyaan pokok yang selalu muncul adalah apa potensi pembangunan utama yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Pertanyaan ini sangat penting artinya karena analisis kondisi umum daerah harus dapat memunculkan analisis tentang potensi utama ekonomi daerah secara sektoral dan kalau dapat sampai ke tingkat komoditi. Dengan cara demikian, diharapkan perumusan strategi dan kebijakan tersebut akan menjadi lebih terarah dan tepat sesuai dengan potensi dimiliki oleh daerah bersangkutan. Menurut Sjafrizal (2012) mengingat dewasa ini tingkat persaingan antar daerah maupun dengan dunia internasional sudah semakin tajam, maka sesuai dengan prinsip dalam *Teori Ekonomi Regional*, maka potensi utama suatu daerah seharusnya dilihat dari sudut pandang Keuntungan Koperatif (*Comperative Advantage*) dari sektor, subsektor dan komoditi tertentu secara relatif terhadap daerah lain. Untuk dapat mengukur dan menentukan potensi pembangunan daerah secara relatif terhadap daerah lainnya, maka Koefisien Lokasi (*Location Quotient*) dapat digunakan. Indeks koefisien lokasi lazim digunakan untuk mengukur potensi relatif dari suatu sektor atau subsektor terhadap perekonomian daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama pada daerah-daerah lainnya

Di samping untuk mengetahui potensi ekonomi daerah, Koefisien Lokasi juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan lokasi tertentu. Dalam hal ini koefisien lokasi ini dapat diartikan sebagai berikut: bila  $LQ > 1$  maka hal ini mengidentifikasi tingginya tingkat konsentrasi kegiatan ekonomi pada daerah atau lokasi tertentu dan demikian pula sebaliknya  $LQ < 1$  (Sjafrizal, 2012). Analisis ini juga diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah karena dalam analisis Ekonomi Regional, khususnya Pusat Pertumbuhan memperlihatkan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu tempat tertentu akan membawa dampak positif yang cukup besar baik untuk perusahaan (Mikro) maupun untuk pembangunan daerah secara keseluruhan (Makro).

#### 1.5.1.4. Tipologi klassen

Untuk melakukan perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah, agar lebih tepat dan terarah, maka perbedaan struktur dan kondisi pembangunan ekonomi daerah tersebut perlu diperhatikan dengan cermat. Kebijakan dan program untuk daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi cepat tentunya tidak akan sama dengan kebijakan dan program untuk daerah yang bertumbuh lambat atau bahkan stagnasi. Karena itu, pengelompokan daerah menurut struktur pertumbuhan dan tingkat pembangunan akan sangat penting artinya sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Pengelompokan daerah menurut struktur pertumbuhan dan tingkat pembangunan ini antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan *Matrik Tipologi Klassen*. Dalam hal ini, pengelompokan daerah dilakukan dengan menggunakan dua indikator utam yaitu: laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita. Dengan cara demikian, akan terdapat empat kelompok daerah yaitu: (1) *Daerah Maju (Developed Region)* pada kuadran I dimana laju pertumbuhan dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari rata-rata. (2) *Daerah Maju Tapi Tertekan* pada kuadran II di mana tingkat pendapatan per kapita daerah telah lebih tinggi dari rata-rata. (3) *Daerah Berkembang* pada kuadran III dimana tingkat pendapatan perkapita masih dibawah rata-rata, tetapi laju pertumbuhan daerah ini telah berada diatas rata-rata. (4) *Derah Tertinggal* pada kuadran IV di mana baik laju pertumbuhan maupun pendapatan perkapita daerah ini berada di bawah nilai rata-



rata. Adapun pengelompokan daerah berdasarkan Tipologi Klassen tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Pengelompokan Ekonomi Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan Pendapatan Per kapita	Laju Pertumbuhan di Atas Rata-rata	Laju Pertumbuhan di Bawah Rata-rata
Pendapatan Perkapita Di Atas Rata-rata	<i>Daerah Maju</i>	<i>Daerah Maju Tapi Tertekan</i>
Pendapatan Perkapita Di Bawah Rata-rata	<i>Daerah Berkembang</i>	<i>Daerah Tertinggal</i>

Sumber: Sjafrizal, 2012

Matrik Tipologi Klassen tersebut akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi penyusun perencanaan pembangunan daerah bilamana teknik ini digunakan sebagai dasar dari perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah. Implikasi darai penggunaan Matrik Klassen Typology tersebut dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah antara lain dapat dilakukan sebagai berikut (Sjafrizal, 2012):

1. Untuk kelompok *Daerah Maju*, kebijakan dan program pembangunan daerah sebaiknya lebih banyak diarahkan kepada sektor dan kegiatan ekonomi dan sosial yang menggunakan teknologi lebih modern dan padat modal seperti sektor industri dan jasa. Dengan cara demikian, produktivitas perekonomian daerah akan dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan kemakmuran daerah setempat;
2. Untuk kelompok *Daerah Maju Tetapi Tertekan*, sebaiknya kebijakan dan program pembangunan untuk kelompok daerah ini diarahkan pada pemecahan masalah yang menyebabkan pertumbuhan daerah ini tertekan, misalnya penurunan harga komoditi unggulan daerah bersangkutan di pasaran dunia. Kebijakan yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan jalan mengalihkan pemasaran produk kegiatan utama daerah bersangkutan ke daerah lain, atau menukar komoditi yang akan diunggulkan oleh daerah bersangkutan.

3. Untuk kelompok Daerah Berkembang, perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah sebaiknya diarahkan pada upaya untuk mendorong proses pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Sejalan dengan hal tersebut perlu pula diupayakan untuk terus mendorong kedatangan modal dan tenaga kerja ahli dari daerah lainnya sehingga daya saing daerah menjadi meningkat.
4. Sedangkan untuk ekonomi Daerah Tertinggal, perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah sebaiknya diarahkan pada upaya untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja melalui pemanfaatan teknologi padat karya. Sedangkan kegiatan ekonomi utama sebaiknya diarahkan pada kegiatan pertanian yang masih menggunakan teknologi tradisional, tetapi produknya mempunyai pasar yang cukup luas seperti tanaman pangan.

#### 1.5.1.5. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan daerah yang semula bersifat sentralisai, sekarang berubah menjadi otonomi (desentralisasi) di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengurus pemerintahan dan mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk lebih mendorong dan meningkatkan aktifitas pembangunan di seluruh daerah sesuai dengan potensi dan permasalahan daerah bersangkutan serta aspirasi serta keinginan masyarakat setempat.

Pada bidang keuangan, pelaksanaan otonomi daerah didukung pula oleh prinsip desentralisasi fiskal sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tujuan utama penerbitan undang-undang ini adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan dukungan keuangan (finansial) dalam bentuk Dana Perimbangan sebagaimana disinggung terdahulu. Menurut Sjafrizal (2012) sejalan dengan hal

tersebut daerah juga diberikan kewenangan untuk menambah sumber pendapatan asli daerahnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Lebih lanjut di samping itu, untuk daerah yang mempunyai kemampuan keuangan yang cukup, pemerintah daerah yang bersangkutan juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman luar negeri untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan daerahnya yang pelaksanaan pinjaman tersebut dilakukan melalui pemerintah pusat yang lazim dikenal sebagai Penerusan Pinjaman (Subsidiary Loan Agreement, SLA).

### **1.5.2. Penelitian sebelumnya**

**Weya, dkk (2015)** dengan judul penelitiannya “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah & PDRB di Provinsi Papua”. Tujuan dari penelitiannya adalah (1) untuk mengetahui pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Papua, (2) untuk mengetahui retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua, dan (3) untuk mengetahui laba usaha milik daerah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah analisis data sekunder. Hasil yang didapatkan dari penelitiannya adalah (1) pendapatan asli daerah positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua. Hal ini berarti semakin tinggi nya pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi .pendapatan asli daerah dalam negeri merupakan suatu hal yang penting bagi suatu daerah khususnya dalam melakukan pembangunan ekonominya guna mengurangi konsumsi masyarakat terhadap produk- produk asing yang dapat mengurangi tingkat tabungan yang tercipta pada masa yang akan datang, (2) retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Hal ini berarti semakin tingginya retribusi daerah maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi, dan (3) laba usaha milik daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Hal ini berarti semakin tingginya laba usaha milik daerah maka semakin pula pertumbuhan ekonomi.

**Pangkiro, dkk (2016)** dengan judul penelitiannya “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara”. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui disparitas ekonomi

yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, dan (2) untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah analisis data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jawaban sebagai turunya angka disparitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi, akibat sumbangan pada sektor yang menyerap tenaga kerja sedikit. Sedangkan sektor dengan tenaga kerja yang banyak masih belum menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi, dan (2) pengaruh tingkat kemiskinan terhadap disparitas ekonomi di Sulawesi Utara yaitu jika terjadi penambahan tingkat kemiskinan sebesar 950 orang jumlah penduduk, maka akan memberikan pengaruh terhadap disparitas ekonomi sebesar 0,03 persen. Meningkatnya jumlah kemiskinan maka akan meningkatkan disparitas ekonomi. Hal ini terjadi karena sector pertanian yang paling banyak penduduk Provinsi Sulawesi Utara menggantungkan hidup sebagai mata pencaharian belum memberikan kontribusi kepada para petani lewat pendapatan. Rendahnya nilai tukar petani memberikan andil nyata pada tingkat kemiskinan serta disparitas ekonomi yang terjadi. Walaupun petani di Provinsi Sulawesi Utara sempat berjaya lewat produksi cengkeh yang menjadi komoditi andalan tetapi rata-rata yang menikmati harga jual dari cengkeh adalah pemilik lahan sedangkan petani yang lain hanya sebagai penggarap atau pekerja sehingga cukup tampak bias.

Penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Salatiga mempunyai tujuan (1) mengetahui potensi ekonomi pada masing-masing kecamatan di Kota Salatiga, dan (2) mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder. Secara rinci mengenai perbedaan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

<b>NAMA</b>	<b>JUDUL</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>METODE</b>	<b>HASIL</b>
Weya, dkk (2015)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah & PDRB di Provinsi Papua	(1) untuk mengetahui pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Papua, (2) untuk mengetahui retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua, dan (3) untuk mengetahui laba usaha milik daerah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua	Analisis data sekunder	(1) pendapatan asli daerah positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua, (2) retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua, dan (3) laba usaha milik daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.
Pangkiro, dkk (2016)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara	(1) untuk mengetahui disparitas ekonomi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, dan (2) untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara	Analisis data sekunder	(1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jawaban sebagai turunya angka disparitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi, akibat sumbangan pada sektor yang menyerap tenaga kerja sedikit. Sedangkan sektor dengan tenaga kerja yang banyak masih belum menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi, dan (2) pengaruh tingkat kemiskinan terhadap disparitas ekonomi di Sulawesi Utara yaitu jika terjadi penambahan tingkat kemiskinan sebesar 950 orang jumlah penduduk, maka akan memberikan pengaruh terhadap disparitas ekonomi sebesar 0,03 persen

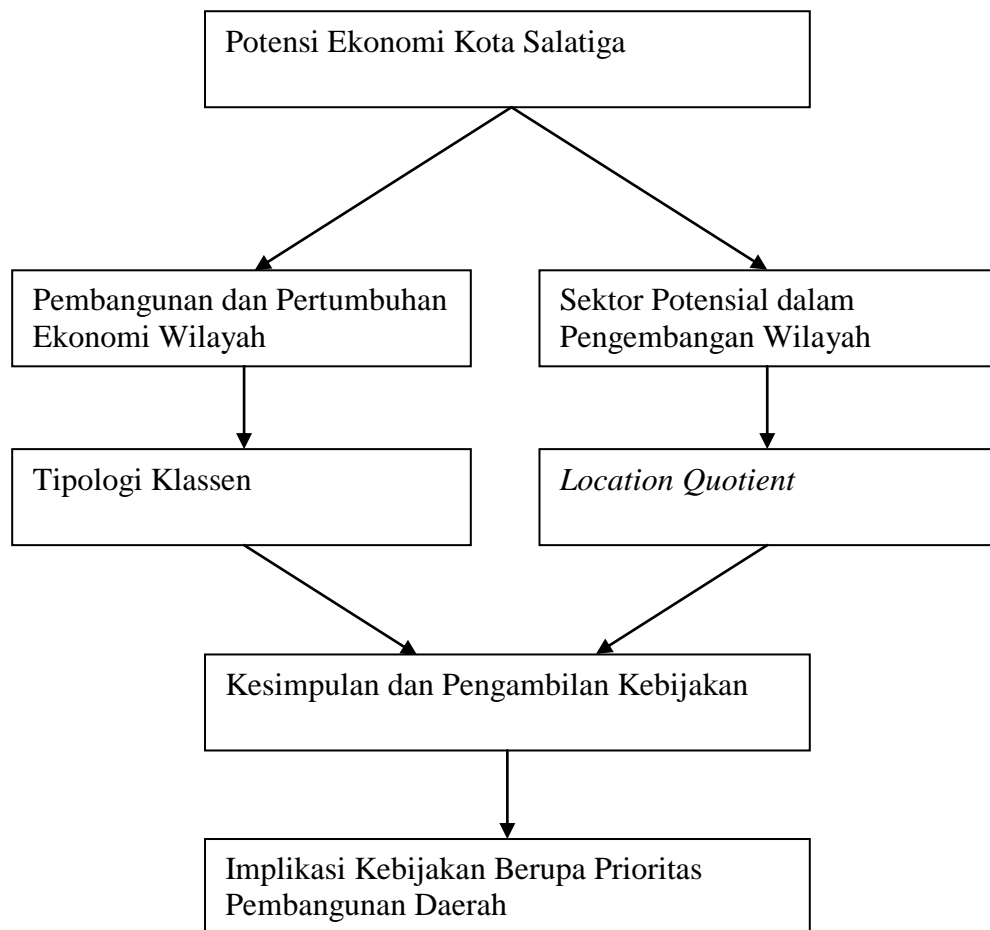
<b>NAMA</b>	<b>JUDUL</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>METODE</b>	<b>HASIL</b>
Asmar Dhani (2016)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2009-2011	(1) mengetahui potensi ekonomi pada masing-masing kecamatan di Kota Salatiga, dan (2) mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga.	Analisis data sekunder	(A) berdasarkan analisis kuosien lokasi (LQ) diperoleh hasil bahwa (1) Kecamatan Argomulyo terdapat 5 sektor usaha potensial, yakni (a) sektor pertanian, (b) sektor pertambangan dan penggalian, (c) sektor listrik, gas, dan air bersih, (d) sektor bangunan, dan (e) sektor pengangkutan dan komunikasi, (2) Kecamatan Tingkir terdapat 4 sektor usaha potensial, yakni (a) sektor pertanian, (b) sektor industri pengolahan, (c) sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan (d) sektor pengangkutan dan komunikasi, (3) Kecamatan Sidomukti terdapat 4 sektor usaha potensial, yakni (a) sektor pertanian, (b) sektor pertambangan dan penggalian, (c) sektor listrik, gas, dan air bersih, dan (d) sektor jasa-jasa, dan (4) Kecamatan Sidorejo terdapat 4 sektor usaha potensial, yakni (a) sektor bangunan, (b) sektor perdagangan, hotel, dan restoran, (c) sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan (d) sektor jasa-jasa. (B) berdasarkan analisis tipologi wilayahnya maka terdapat 3 tipologi wilayah di Kota Salatiga, yakni tipe II, Tipe III, dan Tipe IV. Adapaun sebarannya adalah kecamatan yang memiliki tipe II adalah Kecamatan Sidomukti, tipe III yakni Kecamatan Tingkir dan Sidorejo, dan tipe IV adalah Kecamatan Argomulyo.

Sumber: Peneliti, 2018

## 1.6. Kerangka Penelitian

Salah satu indikator dari kuatnya perekonomian daerah adalah tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Suatu daerah memiliki nilai PDRB dan potensi ekonomi unggulan yang berbeda-beda, namun belum semua potensi ekonomi yang ada yang terkelola dan teridentifikasi dengan baik. Langkah yang diperlukan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih terarah dan tepat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan.

Kota Salatiga yang terdiri dari empat kecamatan memiliki nilai PDRB dan potensi ekonomi unggulan yang berbeda terhadap sektor-sektornya, namun saat ini belum dapat terkelola dan teridentifikasi dengan baik, seperti sektor basis dengan keunggulan kompetitif, komparatif dan spesialisasi belum diketahui. Ini menjadi masalah dalam pengembangan pembangunan di daerah tersebut. Begitu juga dengan daerah acuan sebagai pengembangan pembangunan yang belum terlihat. Merujuk kepada Teori yang ada seperti teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah, maka untuk mengidentifikasi potensi pada masing-masing subwilayah/kecamatan digunakan analisis analisis LQ terhadap sektor basis dan *non*-basis. Lalu untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi pada masing-masing subwilyah/kecamatan di Kota Salatiga digunakan alat analisis Tipologi Klassen. Setelah semua alat analisis digunakan, maka akan didapatkan suatu hasil. Hasil tersebut dijadikan kesimpulan dan pengambilan kebijakan. Dengan kebijakan tersebut akan ada implikasinya berupa prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian terlihat dari penelitian ini akan memiliki peran dalam penentuan prioritas pembangunan daerah khususnya di Kota Salatiga. Dari uraian diatas maka dapatlah disusun suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Penulis, 2018

### 1.7. Batasan Operasional

- a. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto perkapita (Pangkiro, dkk., 2016).
- b. Kuosien lokasi (*Location Quotient*) adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan sektor ekonomi yang merupakan sektor basis dan non basis (Sjafrizal, 2012).
- c. Tipologi Klassen adalah alat analisis yang dipergunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan (PDRB) per kapita daerah (Sjafrizal, 2012).



- d. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah pada periode tertentu (Sjafrizal, 2012)